



JUM'AT, 21 SEPTEMBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Hutang Rp 13,5 M, Belum Ada Payung Hukum

KOTA MANNA - Pembayaran piutang Pemkab Bengkulu Selatan (BS) kepada pihak rekanan sebesar Rp 13,5 miliar masuk dalam prioritas pembahasan RAPBD-Perubahan (APBD-P) tahun 2018. Namun sampai saat ini payung hukum untuk piutang Rp 13,5 miliar belum ada. Jadi belum ada jaminan proyek tahun 2017 akan dibayar.

Lantaran bila dipaksakan untuk bayar utang tanpa payung hukum yang jelas maka dikhawatirkan pembayaran piutang pada pihak rekanan sebesar Rp 13,5 miliar ini bisa menjadi temuan kerugian negara. "Kita bersama DPRD BS masih membahas untuk perumusan payung hukum pembayaran utang kepada rekanan," kata Plt Bupati BS, Gusnan Mulyadi, SE, MM.

Lanjutnya, eksekutif bersama legislatif kini sedang membahas RAPBD Perubahan 2018 yang ditargetkan diketok palu sebelum lewat dari tanggal 25 September. Dengan pembahasan terkait

piutang pada RAPBD-P ini, diharapkan bisa mengantisipasi supaya pembayaran utang kepada rekanan tidak menjadi temuan lembaga audit keuangan negara, BPK. "Jangan sampai nanti niat baik kita membayar utang berakibat hukum pada kita," terangnya.

Karena itu Gusnan minta agar pihak rekanan agar bersabar. Pemkab BS sudah memprioritaskan pembayaran utang pada APBD Perubahan ini, sehingga dengan meminta pihak rekanan bersabar. Bukan berarti Pemkab BS tidak ada niat untuk membayar piutang tersebut. Hanya saja Pemkab BS harus berhati-hati agar tidak berakibat hukum dikemudian hari.

Selain merumuskan payung hukum, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pengacara negara dan BPKP agar pembayaran tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. "Kami juga nanti akan minta auditor BPKP untuk mengecek fisik proyek," jelasnya. (key)